

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pengembangan pariwisata terdapat komponen-komponen penting, antara lain industri pariwisata, tujuan wisata, pemasaran, dan lembaga pariwisata (Singgalen dkk, 2017). Komponen-komponen tersebut melibatkan masyarakat lokal, wisatawan, pemerintah setempat, dan lembaga swasta. Keterlibatan dari setiap para pemangku kepentingan sangat penting dalam pengembangan pariwisata untuk mewujudkan suatu keberlanjutan. Adanya pariwisata yang telah di kembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal itu tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pariwisata serta memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dan pusat (Hamdan dkk, 2019), Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan serta memiliki banyak potensi wisata yaitu potensi wisata alam, budaya, dan buatan. Dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Barat, Dinas Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwisata memiliki peran penting, terutama dalam melakukan koordinasi terhadap semua potensi dan sumber daya yang terdapat pada daerahnya. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat memiliki tugas dalam pengembangan dan penyelenggaraan dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata berdasarkan asas otonomi daerahnya.

Terdapat sepuluh destinasi unggulan dalam *booklet* edisi 2021 milik Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, seperti Sumber Jaya, Pinusan, Wisata Alam Bukit Bawang Bakung, Kampung Kopi Rigin Jaya, Panas Bumi Suoh, Temiangan Hill, Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kebun Raya Liwa, Lumbok Seminung Danau Ranau, serta Way Besai. Seperti yang dijelaskan oleh Pitana & Gayatri, (2005) bahwa pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya. Kihin (2013) mengemukakan juga bahwa pemerintah memiliki peran dalam pengembangan pariwisata serta penerbitan kebijakan dalam pengembangan

pariwisata daerahnya. Namun dalam pengembangannya daerah-daerah pariwisata di Kabupaten Lampung Barat masih ada daya tarik wisata yang belum dikembangkan secara merata, hal ini didukung dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di daya tarik wisata yakni Bukit Bawang Bakung, Lumbok Seminung Danau Ranau yang masih banyak ditemukan infastruktur yang rusak seperti, fasilitas yang tidak terurus dan ketika musim hujan para pengunjung berkurang karena akses jalan yang belum memadai sehingga menyulitkan wisatawan untuk berkunjung di beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

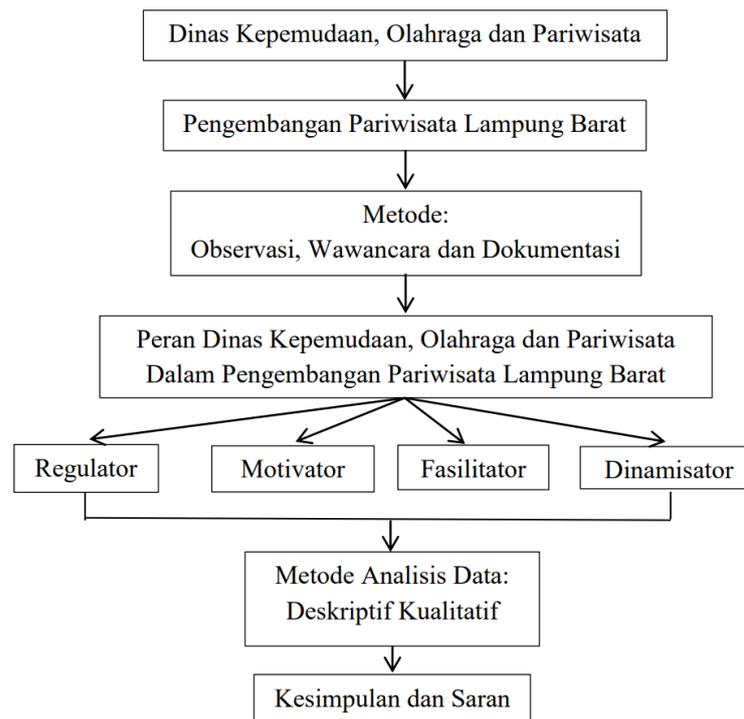
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan juga beberapa unsur yang menarik diatas maka penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir dengan judul “Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat dalam pengembangan pariwisata Lampung Barat”.

1.2. Tujuan

Laporan tugas akhir ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir adalah mendeskripsikan Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat dalam pengembangan pariwisata Lampung Barat.

1.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penulisan, terdapat kerangka pemikiran dengan tujuan mempermudah pembaca memahami susunan dan tujuan penulisan. Berikut kerangka pemikiran dari uraian di atas:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.4. Kontribusi

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

a. Politeknik Negeri Lampung

Diharapkan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan yang berarti untuk Politeknik Negeri Lampung khususnya Prodi Perjalanan Wisata agar semakin meningkatkan kualitas pembelajaran di kemudian hari serta dapat menjadi sumber referensi literatur dan tambahan pustaka.

b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat

Diharapkan tugas akhir ini dapat dijadikan saran dan masukan untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Barat kedepannya lebih baik lagi.

c. Penulis

Diharapkan dengan adanya tugas akhir ini maka penulis dapat memiliki wawasan yang baru mengenai pengembangan pariwisata Lampung Barat.

d. Pembaca

Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat dalam pengembangan pariwisata Lampung Barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pariwisata

Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah salah satu sektor yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi penyokong terbesar devisa negara (Anandhyta & Kinseng, 2020). Pariwisata yaitu suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk usaha, bisnis atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Medi, 2018).

2.2. Peran Dinas Pariwisata

Peran merupakan suatu proses dinamis kedudukan (status) (Soekanto & Sulistyowati, 2009). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto & Sulistyowati, 2009). Selanjutnya peran merupakan atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status (Duverger, 2010).

Pengembangan pariwisata akan mencapai hasil yang optimal bila didukung oleh peran pemerintah. Adapun peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata menurut Kihin (2013) sebagai berikut:

1. Motivator merupakan peran pemerintah dalam menyediakan suatu informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keselamatan dan keamanan untuk wisatawan, selain itu menciptakan iklim yang kondusif dalam perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha dan juga banyak memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai kepariwisataan selain itu memelihara,

mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan potensi-potensi pariwisata.

2. Regulator adalah peran pemerintah untuk menyiapkan arah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas serta tertib administrasi pembangunan pariwisata)
3. Fasilitator merupakan peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang dalam pembangunan daerah-daerah yang memiliki potensi wisata. Salah satu fasilitas penunjang paling utama adalah akses masuk menuju kawasan wisata tersebut.

Sedangkan menurut Pitana dan Gayatri (2005) pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya yaitu:

1. Motivator, dalam pengembangan pariwisata peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
2. Fasilitator, dalam pengembangan pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh dinas pariwisata. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
3. Dinamisator, dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu *Stakeholder* pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiolisme mutualisme demi perkembangan pariwisata.

2.3. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata adalah suatu tindakan yang realistis mengingat dampak positif yang ditimbulkan di antaranya semakin meluasnya kesempatan usaha, baik hotel, biro perjalanan, cinderamata maupun meningkatnya

pendapat masyarakat dan mendorong terpeliharanya keamanan dan ketertiban walaupun sebenarnya juga ada hal-hal yang berdampak negatif (Labaran, Lukman, & Rudi, 2014). Pengembangan pariwisata pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kekayaan wilayah nusantara sebagai modal dan landasan dalam pengembangan budaya bangsa secara keseluruhan dapat dinikmati oleh masyarakat (Modim dkk, 2010).

Menurut Imtihan dkk, (2017) terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam pembangunan, pemerintah perlu mengetahui yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan kemauannya, serta pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemauan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada (Yoeti, 2008).

Pengembangan suatu wilayah pariwisata adalah suatu cara yang dilaksanakan untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memajukan kondisi dari objek wisata yang dikunjungi oleh para wisatawan (Paturusi, 2001). Selain itu juga memberikan manfaat bagi khalayak umum yang terlibat misalnya seperti pemerintah daerah, maupun masyarakat sekitar objek wisata tersebut. Komponen penunjang wisata merupakan komponen kepariwisataan yang harus ada didalam destinasi wisata (Sugiama, 2011). Layanan inti ini ditemukan menjadi penentu terkuat motivasi wisatawan berkunjung kembali (Seetanah dkk, 2010).

Minat kunjungan ulang dapat timbul jika ada penilaian positif pada suatu destinasi wisata, penilaian positif ini terkait salah satunya mengenai komponen 4A destinasi wisata yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan layanan tambahan (Basiya & Rozak, 2012). Suatu daerah wisata dapat dikatakan layak apabila komponen 4A (atraksi, aksesibilitas, *amenity* (fasilitas) , dan *ancillary service* (Lembaga Pelayanan) pariwisatanya sudah terpenuhi yang mana akan berpengaruh terhadap pengembangannya (Amanda & Akliyah, 2022). Adapun 4A tersebut sebagai berikut:

a. Atraksi

Atraksi merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan, atraksi merupakan modal utama (*tourism resources*) atau sumber dari kepariwisataan (Suwena & Widyatmaja, 2010).

b. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemampuan untuk memberikan akses wisatawan ke suatu destinasi wisata termasuk melakukan perjalanan ke seluruh destinasi (Sunmali, 2014), sarana transportasi yang memudahkan wisatawan mencapai destinasi (Nurbaeti dkk, 2021).

c. *Amenity* (Fasilitas)

Fasilitas adalah segala macam sarana dan prasarana pendukung selama pelaku wisata berada di suatu objek wisata (Sugiama, 2011). Sarana tersebut meliputi penyediaan akomodasi, memiliki area untuk mengadakan pertunjukan, kebutuhan makan dan minum, memiliki tempat hiburan dan juga tempat belanja (Sugiama, 2011). Untuk prasarana adalah seperti penyediaan air bersih, tempat sampah, adanya listrik, halte, stasiun kereta, bandara, teknologi komunikasi, pelabuhan dan lainnya (Sugiama, 2011).

d. *Ancillary Service* (Lembaga Pelayanan)

Ancillary atau pelayanan tambahan merupakan adanya lembaga kepariwisataan yang resmi yang mengatur dan juga yang dapat memberikan dampak wisatawan merasa aman dan terlindungi (Sugiama, 2011). Lembaga tersebut memudahkan pelaku wisata dengan berbagai layanan seperti Informasi, keamanan dan lainnya (Sugiama, 2011).